

AUDIENSI DEWAN PENGARAH OGI - 2



Jakarta (3/8) – Setelah melakukan audiensi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (MPPN/Kepala Bappenas), Dewan Pengarah Open Government Indonesia (OGI) melakukan audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Moeldoko. Audiensi tersebut kembali dihadiri oleh Dewan Pengarah OGI, Bapak Yanuar Nugroho selaku OGP Special Envoy, dan Tim Sekretariat Nasional OGI.

Bapak Slamet Soedarsono, Deputy Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan / Bappenas menyampaikan bahwa praktik keterbukaan pemerintah di Indonesia saat ini sudah sangat baik. Beliau juga menjelaskan bahwa praktik baik keterbukaan pemerintah di tingkat pusat

Jakarta (3/8) – After holding an audience with the Minister of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency, the Open Government Indonesia Steering Committee (OGI) held an audience with the Presidential Chief of Staff, Mr. Moeldoko. The audience was attended by the OGI Steering Committee, Mr. Yanuar Nugroho as OGP Special Envoy, and the OGI National Secretariat Team.

Mr. Slamet Soedarsono, Deputy of Politics, Law, Defense and Security of the Ministry of Planning and Development / Bappenas said that the practice of open government in Indonesia is currently very good. He explained that the good practice of open government at the central level has been followed by the local governments, as shown by the

telah diikuti oleh pemerintah daerah, dibuktikan dengan partisipasinya empat pemerintah daerah dalam Open Government Partnership Local (OGP Local).

Sebagai kesimpulan, Beliau menyampaikan dua hal terkait revisi Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional tentang OGI dan narasi mengenai pentingnya keterbukaan pemerintah di forum internasional seperti G20 Summit dan ASEAN. Selanjutnya, Bapak Hari Prabowo, Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri menyampaikan pentingnya pengarusutamaan nilai-nilai keterbukaan pemerintah pada forum-forum internasional. Hal tersebut akan didorong dengan misalnya dengan menyajikan keberhasilan keterbukaan pemerintah pada side events pada forum internasional yang dipimpin oleh Indonesia. Kemudian, Direktur Eksekutif INFID, Bapak Sugeng Bahagjo menyampaikan kemajuan Indonesia dalam pelaksanaan keterbukaan pemerintah. Selain itu, beliau juga menyampaikan rangkaian aktivitas Indonesia dalam mendorong keterbukaan pemerintah di negara-negara tetangga.

Selanjutnya, Ibu Prahesti Pandanwangi, Direktur Aparatur Negara Bappenas menyampaikan bahwa prinsip-prinsip keterbukaan pemerintah di Indonesia telah selaras dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh OGP. Adapun hal yang akan ditingkatkan ialah fungsi dari kesekretariatan yang tidak hanya memfasilitasi tetapi juga berperan aktif di skala global maupun regional. Terakhir, Bapak Yanuar Nugroho menjelaskan peluang keterbukaan pemerintah menjadi salah satu legasi intangible Bapak Presiden Jokowi. Keterbukaan pemerintah dapat menjadi suatu legasi yang esensial karena luasnya manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat.

participation of four local governments in the Open Government Partnership Local (OGP Local).

In conclusion, he conveyed two things related to the revision of the Minister of National Development Planning on OGI and the discussion regarding the importance of open government in international forums such as the G20 Summit and ASEAN. Furthermore, Mr. Hari Prabowo, Director of Economic Development and Environment at the Ministry of Foreign Affairs, conveyed the significance of mainstreaming open government values in international forums. This will be encouraged by, for example, presenting the success of open government practices at side events at international forums led by Indonesia. Then, the Executive Director of INFID, Mr. Sugeng Bahagjo explained Indonesia's progress in implementing open government. In addition, he provided examples in which Government of Indonesia was involved in a series of activities to encourage open government in neighboring countries.

Mrs. Prahesti Pandanwangi, Director of State Apparatus of Bappenas said that the principles of open government in Indonesia are in line with the values set by OGP. However, we need to improve the function of the OGI secretariat which not only facilitates but also plays an active role on a global and regional scale. Finally, Mr. Yanuar Nugroho explained that open government is one of intangible legacies of President Jokowi. Open government can be an essential legacy because of the wide range of benefits that can be received by the community.

After listening to the representatives of the OGI Steering Committee, the Presidential Chief of Staff gave several responses. Mr. Moeldoko said that open government is currently an important issue.

Setelah mendengarkan pemaparan dari perwakilan Dewan Pengarah OGI, Kepala Staf Kepresidenan memberikan beberapa tanggapan. Bapak Moeldoko menyampaikan bahwa keterbukaan pemerintah menjadi isu yang penting saat ini. Pemerintah telah melakukan serangkaian tindakan untuk mendorong keterbukaan pemerintah, salah satunya melalui Festival Hak Asasi Manusia yang berhasil dilaksanakan dan menginspirasi banyak daerah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa adanya perubahan pendekatan pemerintahan dari yang otoriter menjadi peduli dengan Hak Asasi Manusia. Selain itu beliau juga menugaskan Kedeputian II dan V untuk menyusun masukan-masukan yang telah dibahas untuk menjadi salah satu topik dalam pidato presiden pada hari kemerdekaan Indonesia.

The government has taken a series of actions to encourage open government, one of which is through the Human Rights Festival which was successfully implemented. This festival has inspired many local governments to carry out these activities. It shows that there is a change in the government's approach from authoritarian to concerned with human rights.